

**8. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p><b>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</b></p>	<p>1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>	<p>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala daerah.</p> <p>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala daerah.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah.</p> <p>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 daerah.</p> <p>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</p> <p>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</p>
	<p>2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p>	<p>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala daerah.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala daerah.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala daerah.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah.</li> <li>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</li> <li>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala daerah</li> <li>4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah.</li> <li>5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</li> </ol>
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala daerah.</li> <li>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala daerah.</li> <li>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut.</li> <li>4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala daerah.</li> <li>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala daerah.</li> <li>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala daerah.</li> <li>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</li> </ol>
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</li> <li>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala daerah.</li> </ol>
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah.</li> <li>1. Penetapan kriteria daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</li> <li>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</li> <li>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala daerah.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala daerah.
	8. Penanggulangan Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala daerah.</li> <li>2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala daerah.</li> <li>3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala daerah.</li> </ol>
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala daerah.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</li> <li>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> </ol>
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala daerah.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala daerah.</li> </ol>
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala daerah.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala daerah.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala daerah.</li> <li>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala daerah.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala daerah.</li> <li>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala daerah.</li> <li>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala daerah.</li> </ol>
	17. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
<b>2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)</b>	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah.</li> <li>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala daerah.</li> <li>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala daerah.</li> <li>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah.</li> <li>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala daerah.</li> <li>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala daerah.</li> </ol>